



Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya

Yuni Wonda

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: yuniwonda2019@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Dynamics, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Government Policy.

How to Cite:

Wonda Y. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(3): 122-136.

DOI:

10.31957/jeb.v11i3.3281

Organisasi Papua Merdeka (OPM) is considered the group most associated with various forms of community resistance throughout the Papuan landscape. The policy direction of the central and regional governments that ignores the Papuan people is also seen as the source of strengthening the separatist movement. This study uses a qualitative method that seeks to analyze the local government policies of Puncak Jaya Regency regarding the dynamics of the OPM struggle. The results showed that there had been a decrease in OPM sympathizers and members, including deciding to return to the Republic of Indonesia. This reduction was achieved through the Puncak Jaya regency government policy which concentrated on development planning until its realization. Real evidence of development, especially in the interior of Puncak Jaya, makes people feel the state is present in their midst. That the state is not ignorant of them. The most recent policy of the Puncak Jaya regency government is to collect sympathizers or OPM members who wish to join the Republic of Indonesia, provide adequate accommodation, livelihoods and livelihoods, as well as some others are appointed and given the opportunity to become state civil servants. This persuasive approach to development seems to be able to reduce the resistance of the separatist movement (OPM) significantly compared to other military and violent approaches.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Dinamika, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kebijakan Pemerintah

Cara Mengutip:

Wonda Y. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(3): 122-136.

DOI:

10.31957/jeb.v11i3.3281

ABSTRAK

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap sebagai kelompok yang paling diasosiasikan atas berbagai bentuk perlawanan masyarakat disepanjang lanskap Papua. Arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang abai pada masyarakat Papua dinilai pula sebagai biang menguatnya gerakan separatis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupaya menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya terkait dinamika perjuangan OPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan simpatisan dan anggota OPM, diantaranya memustuskan kembali ke NKRI. Penurunan ini dicapai melalui kebijakan pemerintah kabupaten Puncak Jaya yang terkonsentrasi pada perencanaan pembangunan, hingga realisasinya. Bukti nyata pembangunan, khususnya pada wilayah pedalaman Puncak Jaya menjadikan masyarakat merasa negara hadir di tengah tengah mereka. Bahwa negara tidak abai terhadap mereka. Kebijakan paling mutakhir pemerintah kabupaten Puncak Jaya adalah dengan mengakumulir para simpatisan atau anggota OPM yang ingin bergabung ke NKRI, memberi tempat tinggal yang layak, penghidupan dan matapencaharian yang memadai, juga sebagian lainnya diangkat dan diberi kesempatan menjadi aparatur sipil negara. Pendekatan pembangunan yang persuasif ini nampaknya mampu meredam telak geliat perlawanan gerakan separatis (OPM) dibandingkan pendekatan militer dan kekerasan lainnya.

Hak Cipta© 2023 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Berbagai problem yang ada di Papua adalah masalah bangsa dan hal ini penting untuk ditanggapi secara komprehensif berdasarkan konstitusi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebab mengesampingkan problem - problem di Papua adalah inkonstitusional yang bertentangan dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945. Untuk itu, pemerintah harus menyadari bahwa perlu dilakukan pembenahan tata pemerintahan yang lebih baik khususnya di konteks Papua. Di antara permasalahan yang menyita banyak perhatian saat ini adalah gerakan separatis di Papua yang belum ditemukan strategi komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua (Andrianto, 2001). Masalah Papua ini hadir sebagai isu sensitif bagi kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menjadikan pemerintah harus melakukan pengawasan secara kontinu untuk mencegah kecenderungan meningkatnya orasi dan narasi 'pemisahan diri' di Papua (Chalid, 2005).

Latar belakang sejarah ketegangan Pemerintah Pusat dengan Papua sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Saat pemerintahan Orde Baru berkuasa, isu tentang ketimpangan pembangunan di Papua pada khususnya, dan wilayah Indonesia Timur pada umumnya, telah muncul ke permukaan. Saat itu Pemerintah Pusat dianggap telah *menganaktirikan* pembangunan di Papua dan hanya menjadikannya sebagai “*sapi perahan*” bagi pemerintah pusat. Kondisi ini kemudian melahirkan realitas yang sangat ironis, dimana Papua dengan kekayaan alamnya yang sangat berlimpah, ternyata justru mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tidak mengherankan jika pada perkembangannya muncul tuntutan dari masyarakat Papua terhadap ketidakadilan ini. Salah satu tuntutan yang paling ekstrim adalah keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah lama diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Depdagri, 2003:2).

Puncak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk merespon tuntutan masyarakat Papua adalah Undang - undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang - undang ini mulai berlaku pada Tanggal 01 Januari 2002 dengan tujuan untuk melindungi, menjamin dan memperkuat hak-hak Masyarakat Adat Papua (Tjahjono, 2011:21). Walaupun kebijakan ini cukup mendevolusikan kewenangan yang cukup signifikan kepada Papua, namun sama dengan kebijakan-kebijakan yang lalu, sebenarnya kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk perluasan dukungan tidak saja oleh pemerintah nasional dalam kerangka NKRI, namun juga oleh pendukung kemerdekaan Papua. Kebijakan ini merupakan posisi tengah yang memberikan peluang yang sama kepada masing-masing kutub yaitu Pemerintah Pusat dan pendukung Papua merdeka. Bagi Pemerintah Pusat, kebijakan ini memberikan peluang untuk kembali membangun dukungan masyarakat Papua terhadap NKRI (Djojosoekarto, 2014). Namun bagi pendukung Papua merdeka, kebijakan ini juga bisa memberikan ruang gerak yang semakin besar untuk membangun peluang untuk merdeka. Dengan demikian, kebijakan ini harus dimaknai sebagai masa perpanjangan waktu yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing aktor (Osborne, 2001; RUSli, 2006).

Tantangan besar membangun di Papua yaitu memutus historis yang telah melukai perasaan Rakyat Papua. Pemberlakuan kebijakan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) meninggalkan trauma psiko-sosial yang mendalam. Pembunuhan, perampasan hak adat, dan juga kesengsaraan Orang Asli Papua (OAP) menumbuhkan dalam diri kesesuaian OPM. Sehingga simbol perlawanan dengan mengangkat senjata menjadi gertakan tegas bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Pusat sekiranya tidak menunda proses komunikasi konstruktif guna memutus rantai kekerasan. Konflik dua garda terdepan organisasi (OPM dan Militer Indonesia) menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan daerah. Masyarakat Papua di tengah pusaran konflik kerap menjadi korban utama (Enembe, 2016:9).

Kabupaten Puncak Jaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Paniai dengan dasar hukum Pemekaran Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1996 *jo.* Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999. Wilayah ini berada pada posisi 136⁰ 08’-137⁰38’ Bujur Timur dan 2⁰40-4⁰10’ Lintang selatan. Sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2008 Kabupaten Puncak Jaya memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lani Jaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tolikara; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak. Secara umum wilayah

Kabupaten Puncak Jaya berada di ketinggian di atas 2.000 mdpl yaitu sebesar 1864,63 km² atau sebesar 29% dari luas wilayah sedangkan untuk ketinggian dibawah 500 mdpl yaitu sebesar 2.549 km² atau 39%. Luas administratif wilayah Kabupaten Puncak Jaya yakni ± 6.477 Km² atau sebesar 647.700 Ha yang terdiri dari 26 Distrik serta 302 (Tiga Ratus Dua) Kampung yang telah dimekarkan pada tahun 2012 (Bappeda Kabupaten Puncak Jaya, 2014:2), dan pada Tahun 2019 Kabupaten Puncak Jaya telah memiliki 3 (Tiga) Kelurahan.

Saat ini dinamika perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya masih terus berjalan, walaupun dilakukan oleh kelompok kecil saja, hal ini dikarenakan telah banyak anggota OPM yang turun gunung dan kembali menyatu dengan NKRI untuk menikmati pembangunan bersama masyarakat lainnya di wilayah Puncak Jaya. Pertama kali aksi kekerasan oleh OPM yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya adalah pada Tanggal 17 Agustus 2004 Pukul 10.00 WIT Kampung Timongame Distrik Tingginambut, dari peristiwa ini mengakibatkan salah seorang Anggota TNI meninggal dunia. Selama 5 (lima) tahun terakhir, OPM di Kabupaten Puncak Jaya terus melakukan aksi dengan membuat teror kepada Aparat TNI/Polri dan juga warga sipil, telah banyak korban berjatuhan. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya selama ini terus berusaha untuk melakukan komunikasi dengan keluarga Anggota maupun Simpatisan OPM yang masih berada di hutan/gunung yang bergabung dengan OPM untuk keluar hutan/turun gunung dan melihat proses pembangunan yang terus dikerjakan oleh pemerintah, dan hal ini mulai berhasil, banyak dari anggota OPM yang turun gunung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus, yaitu penelitian tentang subjek dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Dalam konteks penelitian ini, menyangkut tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya.

Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Subjek penelitian akan ditentukan berdasarkan purposive sampling, yaitu suatu teknik sampling atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri dan para responden ini adalah orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Total responden/informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 orang.

Dalam melancarkan proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya: 1) Observasi (Pengamatan), 2) Dokumentasi, 3) Wawancara Mendalam (Indept Interview), 4) Focus Group Discussion (FGD), 5) Penelusuran Internet (Gunawan, 2013). Untuk menganalisis data penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan, yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying) (Bungin, 2012).

3. Hasil dan Pembahasan

Papua yang juga dikenal sebagai Bumi Cenderawasih merupakan salah satu diantara 34 Provinsi di Indonesia yang berada di Kawasan Paling Timur Indonesia. Sejak

menjadi bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Tahun 1963 yang kala itu bernama Provinsi Irian Barat hingga sekarang ini tidak pernah *steril* dari kehadiran kelompok-kelompok yang berjuang untuk membebaskan atau melepaskan tanah Papua dari wilayah NKRI. Kelompok tersebut terorganisir dalam wadah Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Keberadaan OPM dengan berbagai bentuk strategi yang dijalankan untuk merealisasikan tujuan perjuangannya mengancam keutuhan bangsa dan keamanan di wilayah Papua, termasuk di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh OPM tidak hanya mengusik keselamatan warga masyarakat, tetapi juga membuat pemerintah tidak dapat melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai dari level pusat atau nasional hingga tingkat kabupaten dan kecamatan/dsitrak mengemban amanah untuk menjaga keutuhan bangsa agar tidak ada satu pun wilayah teritorial Indonesia yang terlepas dari NKRI dan memberikan rasa aman pada warga dari berbagai bentuk teror yang dilakukan oleh gerakan OPM.

3.1 Dinamika Perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya

Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Papua. Oleh karena itu pembahasan mengenai dinamika perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya tidak terpisahkan dengan dinamika perjuangan OPM untuk seluruh wilayah Papua. Sejak wilayah Papua masih berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda, telah muncul keinginan sejumlah elit lokal untuk menjadikan Papua sebagai suatu negara tersendiri yang merdeka dan berdaulat. Keinginan itu dicoba diwujudkan dengan membentuk organisasi gerakan Papua merdeka sewaktu Papua menjadi bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963. Tokoh Papua yang pertama mencanangkan dan memperjuangkan pelepasan wilayah Papua dari NKRI ialah Aser Demotekay. Dia melakukan gerakan bawah tanah dan lebih mengedepankan strategi perjuangannya melalui jalur diplomasi dan kooperasi dengan pemerintah Indonesia ketimbang dengan jalan kekerasan. Tuntutannya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk melepaskan dan memberikan kemerdekaan pada Irian Barat. Bagi Aser Demotekay, Pemerintah Indonesia seyogyanya menyerahkan wilayah Irian Barat karena sesuai dengan janji Alkitab dan janji leluhur bahwa bangsa terakhir yang terbentuk dan menuju akhir zaman ialah tanah Papua Barat atau Irian Barat (Djopari, 1993).

Moses Worrer yang menjadi inisiator pembentukan OPMRC juga melakukan upaya untuk mempersatukan faksi-faksi yang ada di OPM. Hanya saja tidak memberikan hasil yang maksimal. Faktanya, sebagaimana hasil penyelidikan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) yang tertuang dalam laporan berjudul “*The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement*, tahun 2015” bahwa OPM memiliki tiga faksi yang saling bersaing. Ketiga faksi tersebut, yakni: 1) faksi bersenjata. Faksi ini setidaknya terdiri atas tiga elemen dan masing-masing mengontrol wilayah teritorial yang berbeda, yaitu wilayah Timika, dataran tinggi, dan pantai utara; 2) faksi yang bergerak pada aktivitas demonstrasi dan protes; dan 3) faksi yang berbasis di luar negeri (di Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat). Faksi yang terakhir ini relatif kecil, namun sangat aktif mendesiminasikan informasi berkenaan dengan berbagai persoalan di Papua dan untuk kemudian mendapatkan simpati serta dukungan internasional akan kemerdekaan Papua.

Faksi bersenjata tidak tunduk pada satu garis komando, tetapi dikendalikan setidaknya oleh tiga komando yang satu sama lain kerap berkonflik. Ketiga faksi yang dimaksud, yakni: 1) faksi bersenjata yang dikomandoi oleh Goliath Tabuni, yang berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, dipandang yang paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika; 2) Faksi bersenjata yang dikomandoi oleh Puron Wenda. Sebelumnya Puron Wenda merupakan anak buah Goliath Tabuni, namun memisahkan diri dan mendirikan sayap bersenjata tersendiri yang bermarkas di Lanny Jaya. Sekitar tahun 2015 kelompok yang dikomandoi oleh Puron Wenda mengeluarkan pernyataan “perang total revolusioner” dan mengklaim bahwa semua kelompok bersenjata, termasuk kelompok Goliath Tabuni, berada di bawah komandonya. Hanya saja klaim itu bersifat sepihak dan sesuai dengan fakta lapangan. Sayap militer yang dipimpin oleh Goliath Tambuni masih eksis dan tidak mengakui Puron Wenda sebagai pemimpinya; dan 3) sayap militer yang beroperasi di wilayah Pantai Utara dikendalikan atau berada di bawah komando Richard Hans Yoweni, dia bermarkas di wilayah Papua New Guinea.

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Puncak Jaya sendiri telah dijadikan sebagai salah satu markas dan wilayah operasi OPM. Dua faksi OPM yang bermarkas di Kabupaten Puncak Jaya, yakni faksi yang dipimpin oleh Goliath Tabuni dan faksi yang dipimpin oleh Mileter Murib. Kedua faksi tersebut kerap melakukan penyerangan sporadis terhadap pasukan keamanan (tentara dan polisi) dan masyarakat sipil. Penyerangan itu tidak hanya mengakibatkan korban nyawa di kalangan pasukan keamanan dan masyarakat sipil, tetapi juga mengganggu proses pembangunan dan pelayanan publik.

Beberapa kasus gangguan keamanan yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Puncak Jaya, antara lain: *Pertama*, bulan Agustus 2004, faksi OPM yang dipimpin oleh Goliath Tabuni melakukan aksi bersenjata di Kampung Monia, Distrik Tingginambut. Ketika itu, anggota TNI yang sedang berpatroli di Kampung Timongame dan Kampung Monia, Distrik Tingginambut, dihadang oleh pasukan OPM. Karena penghadangan tersebut maka terjadi kontak senjata antara anggota TNI dan anggota OPM. Akibat dari kontak senjata tersebut ialah salah seorang anggota TNI yang terkena tembakan. Namun tidak sampai meninggal dunia. *Kedua*, tahun 2011, kepala kepolisian Mulia yang bernama Dominggus Oktavianus Awes ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Namun dapat diduga bahwa penembakan itu dilakukan oleh anggota OPM. *Ketiga*, tahun 2012, lima orang pasukan bersenjata OPM menembak pesawat sipil Trigana Air sewaktu sedang mendarat menuju tempat parkir di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Pesawat kemudian kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Setelah melakukan penembakan kelimanya melarikan diri masuk ke hutan di sekitar bandara. Akibat dari penembakan itu, seorang yang tewas dan enam orang lainnya yang terluka. Keenam orang itu, yakni: Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher; Beby Astek dan Willy Resubun masing-masing pilot dan kopilot yang terluka akibat pecahan peluru; Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun; dan Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. *Keempat*, tahun 2013, penyerangan yang dilakukan oleh anggota OPM di Puncak Jaya yang menewaskan delapan orang anggota TNI dan empat orang warga sipil. Setelah itu, gangguan keamanan yang dilakukan oleh pasukan OPM di Kabupaten Puncak Jaya terus terjadi dengan intensitas setiap tahunnya naik turun

hingga sekarang. Namun suatu hal yang menggembirakan ialah sejumlah anggota dan simpatisan OPM yang selama ini bergerilya di hutan dan pegunungan menyerahkan diri dan bergabung kembali kepangkuan NKRI. Mereka itu di antaranya Telanggan Gire alias Wiginus, Piningga Gire, Tekiles Tabuni dan Perengga. Mereka itu merupakan anggota pasukan OPM yang diketuai oleh Goliat Tabuni yang menyerahkan diri beserta senjata api dan amunisinya pada tanggal 11 Juni 2019. Selain itu, pada Tanggal 29 Mei 2020, Cari Jalan Telenggen anggota OPM yang bermarkas di wilayah Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Penyerahan dirinya diterima oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP Mikael Suradal dan Kepala Distrik Gurage Usman Telenggen bertempat di Mapolres Puncak Jaya.

Dewasa ini, OPM tidak lagi bermarkas pada satu wilayah tertentu, tetapi bergerak dari satu wilayah Kabupaten ke kabupaten lainnya di wilayah Pegunungan Papua. Demikian halnya faksi OPM yang selama ini berada dan bermarkas di Kabupaten Puncak Jaya bergerilya ke beberapa kabupaten lain seperti Kabupen Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mimika. Kecuali itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa motifasi dari orang-orang yang bergabung dalam OPM tidak semuanya dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk kemerdekaan Papua, tetapi ada sebagian yang tujuannya lebih pragmatis. Merasa lebih beruntung menjadi anggota OPM ketimbang menjadi warga negara biasa. Dengan demikian, sekiranya negara (RI) dapat menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi penduduk Papua, maka sejumlah anggota dan simpatisan OPM lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Hanya saja hal tersebut masih belum terwujud di Papua sehingga sejumlah warga masyarakat masih menjadi anggota dan simpatisan OPM.

Terkait dengan dinamika perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, berikut akan peneliti uraian hasil wawancara dengan informan penelitian. Hasil wawancara dengan Informan 1 menyatakan:

“Saya melihat di Kabupaten Puncak Jaya ini sebenarnya ada dua kelompok OPM. Pertama adalah kelompok OPM yang benar-benar memperjuangkan ideologi mereka untuk Papua Merdeka atau dengan kata lain “Papua Merdeka Harga Mati”. Kelompok ini tinggal di hutan dan gunung - gunung serta memiliki senjata api, dan senjata api yang mereka miliki ini merupakan hasil rampasan dari aparat TNI/Polri. Sedangkan yang kedua adalah kelompok simpatisan dari OPM, kelompok ini bergabung dengan OPM karena berbagai alasan, ada yang sakit hati karena anggota keluarga mereka menjadi korban kekerasan Negara (TNI/Polri), ada juga yang merasa selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, mereka tidak mendapatkan akses layanan dari pemerintah baik Kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya. Untuk kelompok Simpatisan OPM ini berada di tengah - tengah masyarakat dan membaur hidup bersama dengan masyarakat. Kedua kelompok OPM ini memiliki alasan yang berbeda, namun mereka tetaplah masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dan juga saudara-saudara kita yang memang saat ini masih memiliki ideologi atau pemikiran yang berseberangan dengan NKRI. Walaupun untuk mendekati kelompok OPM yang memiliki ideologi “Papua Merdeka Harga Mati” sulit dan penuh tantangan, namun tetap harus dilakukan guna memberikan penjelasan

kepada mereka bahwa proses pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya saat ini terus dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemikiran mereka bahwa mereka telah diperhatikan oleh Pemerintah”.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2, menyatakan:

“Berdasarkan pengamatan saya dan laporan yang saya terima dari anggota, bahwa OPM yang ada di Kabupaten Puncak Jaya ini ada dua kelompok, yaitu kelompok OPM yang berpegang teguh pada ideologi mereka untuk memisahkan Papua dari NKRI atau dengan kata lain ingin membentuk Negara sendiri, kelompok ini sangat berbahaya karena memiliki senjata api. Senjata api ini mereka peroleh dari hasil penyerangan dan perampasan senjata api yang dimiliki oleh Anggota TNI/Polri. Sedangkan kelompok OPM yang kedua ini adalah Kelompok Simpatisan dari OPM, mereka ini berada di tengah-tengah masyarakat, kalau kelompok OPM yang memegang teguh ideologi tadi berada di hutan dan gunung-gunung. Untuk kelompok simpatasi OPM ini sesungguhnya mereka hanya bergabung bersama OPM dengan alasan beberapa hal, ada yang karena dendam dengan Aparat TNI/Polri karena beberapa alasan, ada pula yang merasa bahwa mereka tidak sejahtera dibawah naungan NKRI, sehingga mereka beranggapan jika Papua Merdeka maka nasib mereka akan lebih sejahtera.”

Sementara itu, senada dengan Informan 3 menyatakan:

“Saya melihat OPM yang ada di Puncak Jaya ini sesungguhnya bukan hanya Anggota OPM yang dilandasi ideologi “Papua Merdeka Harga Mati” yang berjuang mengangkat senjata, namun ada kelompok juga yang bergabung bersama OPM karena faktor lainnya, seperti kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat karena merasa selama ini tidak diperhatikan, Hal ini saya melihat wajar, karena terjadi kesenjangan yang sangat jauh sekali antara di Kabupaten Puncak Jaya dengan kota-kota lain di Papua apalagi di wilayah Pulau Jawa sana, Harga-harga kebutuhan pokok mahal, akses internet dan juga komunikasi sangat sulit, transportasi umum untuk menuju Jayapura yang merupakan Ibu Kota Provinsi pun harga tiketnya sangat mahal, lebih mahal dari pada Jayapura ke Jakarta. Mungkin hal inilah yang membuat kekecewaan masyarakat terhadap Negara. Namun saya melihat semenjak Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo, ada keseriusan dari Negara untuk membangun Papua secara umum, dan termasuk Kabupaten Puncak Jaya menjadi perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Saya berharap suatu hari nanti kesenjangan yang ada ini akan terpangkas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa, kelompok OPM yang ada di Kabupaten Puncak Jaya dibawah kelompok Goliat Tabuni dan Militer Murib. Selain itu juga dapat digambarkan bahwa OPM yang ada di

Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari Anggota/Aktor OPM yang memang memiliki ideologi “Papua Merdeka Harga Mati” dan ada Simpatisan OPM.

3.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Merespon Dinamika Perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya

Upaya yang telah dan sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk menanggulangi gerakan OPM dan sekaligus mengajak anggota dan simpatisan OPM agar kembali menjadi warga negara RI di wilayah Kabupaten Puncak Jaya antara lain:

- a. Mengakselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi tupoksi pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya, seperti pembangunan jalan desa dan kecamatan, jembatan, pasar tradisional, sekolah, Puskesmas, tower komunikasi, akses bandara, dan lainnya.
- b. Menambah jumlah tenaga pengajar untuk mengajar di sekolah-sekolah yang telah dibangun oleh dan berada di dalam wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
- c. Mengadakan tenaga kesehatan, seperti dokter umum, bidan dan perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- d. Senantiasa berkordinasi dengan pihak keamanan (TNI/Polri) agar pengamanan yang mereka terapkan di wilayah hukum Kabupaten Puncak Jaya tidak membuat warga masyarakat merasa terintimidasi oleh kehadiran pihak keamanan, tetapi merasa terlindungi dan terayomi.
- e. Senantiasa melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
- f. Aparat pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya turun langsung ke masyarakat baik di tingkat kampung maupun distrik untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat.
- g. Aparat pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya senantiasa mengunjungi keluarga yang ada anggota keluarganya menjadi anggota dan simpatisan OPM yang masih berada di hutan/pegunungan. Melalui kunjungan itu aparat pemerintah berkomunikasi dan meminta kepada keluarga bersangkutan untuk membujuk anggota keluarganya menyerahkan diri bergabung kembali ke NKRI dan menikmati pembangunan bersama masyarakat lainnya.
- h. Aparat pemerintah daerah kerap berkomunikasi dan berkordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, antara lain: tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, agar ikut serta mendesiminasikan informasi berkenaan dengan pembangunan yang telah dan sedang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Dengan informasi itu, maka kesan bahwa Papua di anak tirikan oleh negara yang menjadi salah satu penyebab mereka menjadi anggota dan simpatisan OPM menjadi hilang dan arena itu akan kembali menjadi warga negara yang baik. Selain itu, ikut menginformasikan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menjadi anggota dan simpatisan OPM untuk membujuk anggota keluarganya itu kembali ke pangkuan NKRI.
- i. Aparat pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam segala bidang, terutama bidang kesehatan dan pendidikan.
- j. Memberikan bantuan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

- k. Semua instansi yang ada dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya mengemban tugas untuk menanamkan kecintaan warga masyarakat terhadap NKRI. Dengan demikian penanaman kecintaan terhadap NKRI itu menjadi program kerja bagi setiap instansi. Sebagai contoh program kerja yang dilakukan oleh Polres Puncak Jaya melalui Binmas Noken Polri yang berada di kampung-kampung, personil Binmas Noken Polri ini selalu memberikan materi kepada masyarakat tentang menanamkan kecintaan terhadap NKRI. Demikianlah sehingga sehingga Pemerintah Daerah dalam mengatasi Organisasi Papua Merdeka ini tidak bekerja sendiri, melainkan saling terkordinasi dengan semua elemen yang ada di Kabupaten Puncak Jaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya berusaha merumuskan kebijakan yang berorientasi bagi menanggulangi perjuangan OPM dengan memerhatikan faktor yang menjadi penyebab sehingga sejumlah warga masyarakat Kabupaten Puncak Jaya lebih tertarik menjadi anggota dan simpatisan OPM ketimbang menjadi warga negara RI. Rumusan kebijakan itu dilakukan dengan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar kebijakan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya menyadari bahwa masalah kemiskinan, ketiadaan dan keterbatasan infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) dan deskriminasi yang menjadi faktor penyebab dari munculnya keinginan sejumlah warga masyarakat bergabung dengan OPM. Bertolak dari hal tersebut maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya ialah yang berorientasi bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan dan penyediaan parasarana dan sarana yang bersangkutan paut dengan kebutuhan dasar, seperti: kesehatan, pendidikan, dan perekonomian rakyat. Dengan demikian, opsi dengan pendekatan militer tidak pernah diambil oleh Pemerintah Daerah. Aparat TNI/Polri yang ada di Kabupaten Puncak Jaya lebih berfungsi sebagai pengayom dan melindungi warga dari berbagai ancaman keamanan. Selain itu, aparat TNI/Polri di wilayah Kabupaten Puncak Jaya mengemban tugas untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan warga masyarakat terhadap NKRI.

Kebijakan yang telah diambil dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang tujuannya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi pergerakan OPM di Kabupaten Puncak Jaya diantaranya:

- a. Anggota dan simpatisan OPM yang secara sukarela menyerahkan diri dan bergabung kembali ke NKRI tidak diberikan sanksi hukum, tetapi malahan diakomodir keinginannya selama itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya. Sebagai contoh, jika berkeinginan untuk mendaftar diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi mereka. Atau menjadi tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- b. Memberikan bantuan perumahan layak huni bagi mantan anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang telah menyerahkan diri bergabung kembali ke NKRI.

- c. Memberikan pelatihan untuk berkebun dan modal usaha bagi mantan anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang telah menyerahkan diri bergabung kembali ke NKRI.

Dengan adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya ini dapat dirasakan secara langsung oleh para mantan anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka, sehingga mereka dapat merasakan secara langsung kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya selalu berupaya untuk merangkul mereka yang sekarang ini masih menjadi anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka, bagaimanapun juga mereka ini adalah warga negara Indonesia yang saat ini masih memiliki pandangan berbeda dengan NKRI, mereka perlu diberikan pemahaman bukan untuk dimusuhi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya terus membuat terobosan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir keinginan dan aspirasi mereka namun tetap dalam koridor NKRI.

Tidak mudah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk dapat membujuk anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka untuk semuanya langsung dapat menyerahkan diri kembali bergabung kembali ke NKRI, mereka ini tidak dapat dibujuk dengan janji-janji, karena mereka merasa sudah sering kali diberikan janji kosong oleh pemerintah. Yang diharapkan mereka adalah kerja nyata dari pemerintah dalam membangun daerah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya selama ini terus berupaya membuat terobosan kebijakan-kebijakan daerah guna dapat menampung aspirasi mantan anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang telah keluar hutan/turun gunung menyerahkan diri kembali bergabung ke NKRI.

3.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Dinamika Perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya

Dalam menjalankan suatu kebijakan pasti ada pro dan kontra, ada aspek tertentu yang menjadi faktor pendukung dan ada pula aspek tertentu yang menjadi penghambat. Walau demikian, pemerintah harus menjalankan kebijakan yang telah diyakini lebih bermanfaat dan berdayaguna. Menanggulangi pihak yang tidak setuju terhadap kebijakan tertentu diupayakan dengan berkordinasi dengan para pihak (*stakeholders*) agar yang tidak setuju dapat memahami dan memaklumi kebijakan yang telah diambil serta tidak menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Sementara hal-hal yang menjadi faktor pendukung harus semakin diperbesar agar tujuan kebijakan lebih cepat terealisasikan. Sebaliknya faktor yang menjadi penghambat selain harus diketahui secara lebih komprehensif, juga harus ditanggulangi untuk meredam perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya.

Berikut ini diuraikan mengenai factor - faktor yang dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam merespon perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya. Setelah itu diuraikan mengenai factor-faktor yang dapat menghambat kebijakan pemerintah daerah dalam merespon perjuangan dan gerakan OPM di Kabupaten Puncak Jaya.

1. Faktor Pendukung

Beberapa di antara faktor yang kondusif mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Dinamika Perjuangan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, yakni:

- a. Keseriusan Pemerintah Pusat di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam membangun Provinsi Papua secara umum. Keseriusan itu tidak hanya ditandai oleh besarnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat ke Provinsi Papua, termasuk di Kabupaten Puncak Jaya, tetapi juga pembangunan infrastruktur transportasi, seperti Bandara Mulia, dan bahkan Presiden Joko Widodo paling sering berkunjung ke Provinsi Papua.
- b. Tidak semua anggota OPM yang keanggotaannya didasarkan pada keinginan yang sungguh-sungguh untuk melepaskan Papua dari wilayah NKRI. Mereka itu menjadi anggota atau simpatisan OPM karena mereka merasa kehidupannya lebih baik ketimbang menjadi warga negara Indonesia. Anggota dan simpatisan OPM yang mempunyai motif yang demikian itu relatif lebih mudah dipengaruhi untuk kembali menjadi warga NKRI.
- c. Semakin banyak anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang keluar dari hutan/turun gunung menyerahkan diri dan bergabung kembali ke NKRI.
- d. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Puncak Jaya cenderung semakin meningkat, sehingga lebih dapat melihat secara objektif keseriusan pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua, khususnya yang bermukim di Kabupaten Puncak Jaya.
- e. Ketersediaan infrastruktur komunikasi sehingga warga masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya lebih mudah berkomunikasi dan mengakses informasi melalui dunia maya dan media sosial.
- f. Sebagian di antara anggota dan simpatisan OPM ini yang merasa tertipu dengan informasi dan hasutan yang disampaikan oleh pimpinan/petinggi OPM bahwa tidak lama lagi Papua akan merdeka dan mendapatkan pengakuan dari PBB. Ternyata setelah bertahun-tahun tinggal di dalam kawasan hutan tidak ada tanda-tanda bahwa Papua akan merdeka. Mereka itu potensial untuk kembali menjadi warga NKRI.

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat kebijakan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi gerakan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, antara lain:

- a. Masih ada sebagian dari anggota dan simpatisan OPM yang memiliki ideologi yang kuat untuk “Papua Merdeka”.
- b. Anggota dan simpatisan OPM masih memiliki senjata api yang relatif banyak, baik yang didapatkan melalui hasil rampasan dari aparat TNI/Polri maupun yang diselundupkan dari Papua Nugini.
- c. Sebagian di antara anggota dan simpatisan OPM senantiasa berada dan bergerilya di dalam kawasan hutan yang medannya sangat sulit dijangkau. Oleh karena medannya sangat sulit maka aparat pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat yang pro NKRI sulit untuk menemui dan membujuk mereka agar berkenan kembali ke pangkuan NKRI. Selain itu, mereka tidak pernah menyaksikan langsung hasil-hasil pembangunan yang telah dan sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sehingga hal yang

mereka ketahui tentang keadaan Kabupaten Puncak Jaya sama seperti dahulu sebelum masuk hutan, yaitu terbelakang. Karena itu mereka tidak tertarik untuk kembali menjadi warga negara RI yang baik.

- d. Pendekatan militer yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda di kalangan penduduk sipil di Papua. Hal itu menimbulkan antipasti oleh sejumlah warga masyarakat; dan perasaan itu belum sepenuhnya pulih serta masih menyimpan perasaan dendam di kalangan sebagian anggota masyarakat. Oleh karena itu mereka lebih memilih menjadi anggota dan simpatisan OPM dibandingkan dengan menjadi warga negara Indonesia.
- e. Kondisi kemiskinan, keterbatasan infrastruktur sosial, dan keterbelakangan yang dialami oleh Provinsi Papua, dan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya menjadi alasan yang kuat yang mendasari sejumlah warga untuk menjadi anggota dan simpatisan OPM.

4. Kesimpulan

Perjuangan OPM di Papua dan Kabupaten Puncak Jaya khususnya, telah ada sejak Indonesia menjadikan wilayah Papua sebagai Provinsi ke-34 di wilayah NKRI dan masih tetap eksis hingga sekarang ini. Keberadaan dan perjuangan mereka mengalami dinamika seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam internal OPM dan respon dari pemerintah Indonesia serta perubahan sistem politik Indonesia dan perubahan yang terjadi di lingkungan global.

Beberapa tahun terakhir, seiring dengan perubahan respon negara terhadap Provinsi Papua dan khususnya OPM, yang sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan militer ke pendekatan yang lebih berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, terdapat sejumlah anggota dan simpatisan OPM yang turun gunung, keluar dari hutan dan kembali bergabung dengan NKRI. Selain itu, intensitas gangguan keamanan atau terror yang dilakukan sudah mulai berkurang. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya selama ini terus berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menampung aspirasi dari mantan anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang telah kembali bergabung ke NKRI, salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah adalah mengakomodir mantan anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang telah menyerahkan diri bergabung kembali ke NKRI, jika berkeinginan untuk mendaftar diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya terus berupaya dalam merespon dinamika perjuangan Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Puncak Jaya, salah satu upaya yang dilakukan adalah terus berupaya meningkatkan pembangunan, seperti jalan, jembatan, pasar tradisional, sekolah, puskesmas, tower komunikasi, akses bandara, dan lainnya, dan juga meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat TNI/Polri, DPRD, dan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Puncak Jaya.

Salah satu yang menjadi faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah dalam merespon dinamika perjuangan Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Puncak Jaya adalah saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi ada keseriusan untuk membangun wilayah Papua secara umum, sedangkan yang menjadi faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah salah satunya adalah masih banyaknya senjata api hasil rampasan dari aparat TNI/Polri yang dikuasai oleh Organisasi Papua Merdeka, sehingga mereka dengan mudah dapat melakukan aksi-aksi teror.

Rekomendasi dari hasil riset ini menyarankan bahwa untuk Pemerintah Pusat untuk terus berupaya mewujudkan Sila Kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sehingga masyarakat yang berada di Provinsi Papua dan khususnya di Kabupaten Puncak Jaya dapat merasakan keadilan disemua aspek kehidupan, baik itu pembangunan, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan. Kemudian, Pemerintah Provinsi Papua untuk terus dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk terus berupaya melakukan komunikasi dengan saudara-saudara kita yang masih memiliki pemikiran berbeda dengan NKRI, bagaimanapun mereka ini adalah warga negara Indonesia juga, sehingga perlu diberikan pemahaman yang baik dan informasi yang benar. Juga Bagi Aparat TNI/Polri untuk dapat menjalankan tugas dengan cara persuasive dan tidak mengedepankan kontak senjata dalam merespon pergerakan Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Puncak Jaya. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya untuk terus berusaha melakukan pendekatan kekeluargaan dan budaya kepada anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka yang masih berada di gunung/hutan, untuk segera kembali bergabung ke NKRI. Serta bagi anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk dapat melakukan genjatan senjata dan menyerahkan diri kembali bergabung ke NKRI untuk bersama-sama menikmati pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Andrianto, T. T. (2001). *Mengapa Papua Bergolak ?*. Jakarta: Gama Global Media.
- Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Puncak Jaya. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Periode 2015-2025*. Mulia: BAPPEDA.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2003). *Laporan Akhir: Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM..
- Djojoseokarto, A. (2014). *Kinerja otonomi khusus Papua*. Jakarta: KITLV & Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Djopari, J. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Enembe, L. (2016). *Papua: Antara Uang dan Kewenangan*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Osborne, R. (2001). *Kibaran Sampari (Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Rusli. (2006). *Gerakan Aspirasi Merdeka: Studi Kasus Gerakan Kemerdekaan di Papua Pada Awal Reformasi*. Depok: Universitas Indonesia.

Tjahjono, B. (2011). *Hak Asasi Manusia di Papua 2010/2011*. Jayapura: Papua Land of Peace.

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2008 Kabupaten Puncak Jaya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.